

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
LIDYA MARGARETHA SILABAN
130810161**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana (S1) pada
Jurusan Akuntansi**



Oleh:

**LIDYA MARGARETHA SILABAN
130810161**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/ atau magister), baik di Universitas Putra Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Batam, 14 Februari 2017

Lidya Margaretha Silaban

NPM: 130810161

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP
PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI
KOTA BATAM**

Oleh:

LIDYA MARGARETHA SILABAN
NPM. 130810161

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat Untuk
memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ekonomi
pada Jurusan Akuntansi**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini
Batam, 14 Februari 2017**

Haposan Banjarnahor ,S.E.,M.Si
Pembimbing

ABSTRAK

Kota Batam merupakan kota industri paling berkembang di Indonesia, Kota Batam memiliki sumber-sumber pendapatan yang melimpah disetiap sektornya. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan 72 data laporan keuangan yang bersumber dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Tahun 2010-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa secara empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Penyusunan Anggaran Belanja Daerah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda menunjukkan secara parsial pendapatan asli daerah maupun dana alokasi umum berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja daerah. Hal ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum merupakan penghasil pemasukan yang besar untuk Penyusunan Anggaran Belanja Daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah.

ABSTRACT

Batam is the most developed industrial cities in Indonesia, Batam has revenue sources are abundant in every sector. Therefore, research aim to demonstrate empirically the effect of revenue (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) to the Regional Shopping in Batam. This study uses 72 financial data derived from the Report of Regional Budget of the Year since 2010-2015. The purpose of study was to prove empirically that the Local Revenue and General Allocation Fund Expenditure. Budgetary effect on Daerah. Metode analysis used is multiple linear analysis showed partial local revenue and general allocation funds affect preparation of the state budget. This proves that the Local Revenue and Regional Allocation Fund is a great income producer for the preparation of the Regional Budget.

Keywords : Locally Generated revenue, General Allocation Fund, Regional expenditure.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putra Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terimakasih dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putra Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putra Batam sekaligus selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Putra Batam yang dengan tulus telah menyisihkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tugas akhir.
3. Dosen dan staff Universitas Putra Batam yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis dalam segala hal yang penulis lakukan.
4. Bapak S.Silaban dan MamiE.F Sinaga selaku orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penulis.
5. Seluruh keluarga Mike, Mike Evi, Mike Hotnida, Mike Elfrida, Mike Mala, Mike Jeni yang telah memberi semangat tahap demi tahap penyelesaian skripsi penulis.

6. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Calon suami, R.Simanjuntak yang tidak henti – henti nya memberikan support, semangat dan doa kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman seperjuangan terutama mahasiswa / i Program Studi Akuntansi Putra Batam yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama perkuliahan serta dalam masa penyusunan skripsi.
9. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu melimpahkan berkat dan rahmat Nya kepada mereka yang penulis sebutkan. Jasa – jasa mereka akan selalu dikenang dan tidak akan penulis lupakan.

Batam, 14 Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR RUMUS	
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	10
2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah	11
2.1.3 Cara Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.4 Dana Alokasi Umum	16
2.1.5 Penerapan Alokasi	18
2.1.6 Belanja Daerah	19
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Pemikiran	26
2.4 Hipotesis	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian	28
3.2	Operasional Variabel	29
3.2.1	Variabel Independen (X)	29
3.2.1.1	Pendapatan Asli Daerah (X1).....	30
3.2.1.2	Dana Alokasi Umum (X2)	30
3.2.2	Variabel Dependen (Y)	30
3.2.2.1	Belanja Daerah (Y1)	30
3.3	Populasi dan Sampel	31
3.3.1	Populasi	31
3.3.2	Sampel	31
3.4	Teknik Pengumpulan Data	32
3.5	Metode Analisis Data	33
3.5.1	Statistik Deskriptif	33
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	34
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	34
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	35
3.5.2.3	Uji Autokorelasi	36
3.5.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	38
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
3.5.4	Uji Hipotesis	40
3.5.4.1	Uji Koefisien Determinasi	40
3.5.4.2	Uji t (Parsial)	41
3.5.4.3	Uji F (Simultan)	42
3.6	Lokasi Dan Jadwal Penelitian	43
3.6.1	Lokasi Penelitian.....	44
3.6.2	Jadwal Penelitian.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	46
-----	------------------------	----

4.1.1	Analisis Deskriptif	46
4.1.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	47
4.1.2.1	Hasil Uji Normalitas	48
4.1.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
4.1.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	52
4.1.2.4	Hasil Uji Autokorelasi	53
4.1.3	Hasil Regresi Nilai Berganda.....	54
4.1.4	Hasil Hipotesis	56
4.1.4.1	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	56
4.1.4.2	Hasil Uji T.....	57
4.1.4.3	Hasil Uji F.....	58
4.2	Pembahasan	59
4.2.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Belanja Daerah	59
4.2.2	Pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) terhadap Belanja Daerah.....	60
4.2.3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah	60
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran PAD,DAU, dan Belanja Daerah Kota Batam	6
Tabel 2.2	Peneliti Terdahulu	25
Tabel 2.3	Kerangka Pemikiran.....	26
Tabel 3.1	Tabel Durbin-Watson.....	37
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian	45
Tabel 4.1	Analisis Deskriptif.....	46
Tabel 4.2	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	51
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	53
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel 4.6	Hasil Regresi Nilai Berganda	55
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	56
Tabel 4.8	Hasil Uji T	57
Tabel 4.9	Hasil Uji F	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Hasil Uji Histogram	49
Gambar 4.2	Hasil Uji Normal P-Plot	50

DAFTAR RUMUS

Rumus3.1	Durbin-Watson	38
Rumus 3.2	Regresi Linear Berganda	40
Rumus 3.3	Regresi Analisis Koefisien Determinasi.....	41
Rumus 3.4	Rumus Uji T	42
Rumus 3.5	Rumus Uji F	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan suatu daerah erat kaitannya dengan baiknya pengelolaan perekonomian pada daerah tersebut. Sehingga pada reformasi sektor public yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas, sehingga membuat kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk pada bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU. No 32 Tahun 2004).

Otonomi daerah adalah upaya untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

sesuai dengan perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (UU.No 33 Tahun 2004)

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain lain yang sah.

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi potensi yang ada didaerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda beda. Daerah yang memiliki kemajuan padabidang industri dan memiliki kekayaan yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Pada satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah

yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah, permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD dan masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan penguasaan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah,. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Dana Alokasi Umum merupakan dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan

pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing masing daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisas, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek , dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib , urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualiatas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial . Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah,bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan , dan belanja tidak terduga.

Belanja daerah menurut IASC Framework (Halim,2002 : 73) biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih “.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian objek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Urusan wajib sendiri urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, keikhlasan, dan potensi keunggulan daerah.

Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan Pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum

penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1. Anggaran PAD, DAU, dan Belanja Daerah Kota Batam

TAHUN	PAD	(%)	DAU	(%)	BELANJA DAERAH	(%)
2010	175.044.493.202,-	90,84	230.164.681.000,-	100	1.284.136.946.162,-	90,11
2011	276.757.849.579,-	117,27	316.627.023.000,-	100	1.290.046.449.434,-	92,27
2012	371.655.668.413,-	111,17	429.672.271.000,-	100	1.480.722.555.165,-	88,28
2013	515.456.622.984,-	117,63	528.839.827.000,-	100	1.808.648.575.640,-	92,62
2014	643.356.518.018,-	121,23	559.103.958.000,-	100	2.168.207.401.217,-	99,75
2015	812.739.614.160,-	102,95	529.988.410.000,-	100	2.375.904.769.162,-	90,60

Tabel 1.1 diatas adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun 2010-2015 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan bagian Sekretariat Pemerintah Kota Batam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH DI KOTA BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ,maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah mempunyai persentase yang tidak stabil, di beberapa tahun terjadi kenaikan pendapatan tetapi di beberapa tahun juga mengalami penurunan persentase atas pendapatan.
2. Dana Alokasi Umum berada di persentase yang stabil, tetapi masih jauh dari yang diharapkan.
3. Dari Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diatas, maka jelas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran belanja daerah. Dari pendapatan daerah tersebut, belanja daerah pada 2011 mengalami kenaikan 2,16% dari Tahun 2010, tetapi pada Tahun 2012 anggaran belanja turun 3,99% dari 92,27% menjadi 88,28%. Tahun 2013 kembali mengalami kenaikan anggaran sebesar 4,34% hingga puncaknya pada Tahun 2014 anggaran belanja daerah naik cukup signifikan sebesar 7,13% sehingga belanja daerah hampir mencapai 100% yaitu 99,75%, namun anggaran belanja daerah pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan sebesar 9,15%

Dari data diatas, peneliti menyimpulkan adanya ketidak maksimalan daerah dalam memaksimalkan potensi daerah sehingga menyebabkan PAD dan DAU di beberapa tahun berjalan yang timpang dibanding dengan belanja daerah Kota Batam.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penerapan penelitian ada beberapa batasan yang dibuat yaitu ?

1. Penelitian yang dilakukan menurut data Tahun 2010-2015.
2. Penelitian pada PAD, DAU dan Belanja daerah dibatasi pada data yang diterima dari Pemko Batam.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik permasalahan yang akan difokuskan pada penelitian antara lain :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Kota Batam periode 2010-2015
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Kota Batam periode 2010-2015
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah di Kota Batam Periode 2010-2015

1.5 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi, maka penelitian bertujuan untuk membuktikan bahwa secara empiris berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintahan di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Pemerintahan Kota Batam.
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintahan Kota Batam.
3. Bagi Akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Penyusunan Anggaran Belanja Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ahmad Yani (2002:51) bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah”, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 undang-undang nomor 33 tahun 2004 menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam pasal 6 undang-undang nomor 33 tahun 2004 menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari :

a. Pajak daerah

Menurut Siahaan (2005:7), pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara dalam hal ini pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jenis-jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi terdiri dari :

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

- b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- e. Pajak bea balik nama tanah (Pulisi).
- f. Pajak izin penangkapan ikan di wilayahnya.

2. Pajak kabupaten/kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame..
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- g. Pajak parkir.
- h. Pajak anjing.
- i. Pajak pertunjukan dan keramaian umum.
- j. Pajak kendaraan tidak bermotor.
- k. Pajak pembangunan.
- l. Pajak radio.
- m. Pajak bangsa asing.
- n. Pajak potong hewan.
- o. Pajak lain-lain.

a. Retribusi daerah

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut UU N0.34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 mengenai retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni :

1. Retribusi jasa umum seperti : Retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pengujian kapal perikanan, retribusi pelayanan kesehatan jasmani, retribusi pelayanan persampahan ataupun kebersihan, retribusi pergantian suatu biaya cetak KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta juga akte suatu catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan juga pengabuan mayat, dan retribusi pelayanan parkir pada tepi jalan umum.
2. Retribusi jasa usaha seperti : Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah pemotongan hewan, retribusi pelayanan pelabuhan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyebrangan diatas air, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggahan atau villa.

3. Retribusi perizinan tertentu, seperti : Retribusi izin mendirikan bangunan.
Retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

c. Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang mencakup :

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan.
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
3. Jasa giro.
4. Bunga deposito.
5. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.
6. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi.

7. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
8. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan
9. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
10. Pendapatan dari pengembalian.

2.1.3 Cara Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Meskipun penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai saat ini namun pemerintah daerah harus berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Berdasarkan pengalaman selama ini, dapat dikemukakan berbagai upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan retribusi daerah misalnya :

1. Memperbaiki sstem pengelolaan selain tunggu bola harus secara aktif jemput bola.
2. Melakukan pendataan secara lengkap dan akurat
3. Meningkatkan koordinasi eksternal (antar instansi terkait) dan koordinas internal (antar bagian/unit dalam instansi).
4. Penguatan kelembagaan
5. Meningkatkan rasio kecakupan (*coverage ratio*)
6. Meningkatkan sarana dan prasarana penagihan.

7. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi melalui kegiatan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi bagi masyarakat.

2.1.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) dananya diperoleh dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Durse (2008:38) dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 10 undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki jumlah yang sangat signifikan sehingga semua Pemerintah Daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya dalam APBN. Oleh karena itu Dana Alokasi Umum (DAU)

dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebagian control yang lebih besar terhadap keuangan negara.

Penggunaan Dana Alokasi Umum ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam perhitungannya DAU menggunakan formula yang menggunakan beberapa aspek seperti luas daerah, jumlah penduduk, indeks harga bangunan, dan jarak tingkat kemiskinan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi di seluruh Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi,Kabupaten,Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*,

dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Guna Dana Alokasi Umum (DAU) ini juga untuk menutup celah atau kekurangan yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi potensi penerimaan daerah yang ada.

2.1.5 Penerapan Alokasi

Dana alokasi umum (DAU) ini merupakan seluruh alokasi umum daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kenaikan DAU akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi terdiri dari :

1. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi.
2. Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota.

Dana alokasi umum untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah dana alokasi umum untuk suatu daerah yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio daerah bobot provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh provinsi.

Transfer dana berupa dana alokasi umum ini bertujuan untuk pemerataan pendapatan antar daerah karena pemerintah pusat menyadari setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Daerah dengan potensi rendah akan mengalami

kesulitan pemenuhan kegiatan belanja sehingga akan tertinggal dengan daerah yang lain.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya perimbangan tersebut, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari Pemerintah pusat kepada daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat memutuskan penggunaan dana tersebut apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

2.1.6 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah pada pasal 1 (Ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 pada pasal (huruf q) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tahun yang bersangkutan.

Menurut Kepmendagri nomor 29 Tahun 2002 , belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari :

- a. Pelayanan Umum
- b. Ketertiban dan Keamanan
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan hidup
- e. Perumahan dan Fasilitas Umum
- f. Kesehatan
- g. Pariwisata dan budaya
- h. Agama
- i. Pendidikan
- j. Perlindungan Sosial.

Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok yaitu

:

1. Belanja Administrasi umum

Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik, belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis yaitu :

a. Belanja Pegawai

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personil yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.

b. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan dengan pelayanan publik.

c. Belanja Perjalanan Dinas

Merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

d. Belanja Pemeliharaan

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

2. Belanja Operasi

Pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi :

a. Belanja Pegawai

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personel yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

b. Belanja Barang

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

c. Belanja Perjalanan

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

d. Belanja Pemeliharaan

Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

3. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi :

a. Belanja Publik

Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans.

b. Belanja aparatur

Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati secara langsung oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur . Contoh belanja aparatur yaitu pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan, dan pembangunan rumah dinas.

4. Belanja Transfer

Merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran :

a. Angsuran Pinjaman

b. Dana Bantuan

c. Dana Cadangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti bernama Marissa Ayu Saputri pada Tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul “Flypaper Effect pada DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di kota Belitung” dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan DAU sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Pada Tahun 2013 Heri Sumbodo melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pemodelan Regresi panel pada PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah” dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model regresi panel yang sesuai digunakan untuk memodelkan pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah wilayah jawa timur dengan pertumbuhan ekonomi rendah dari tahun 2007-2011 mengikuti *fixed effect model*.

Masih pada tahun yang sama Wiwin Anggriani melakukan penelitian dengan judul “Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah” dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, hasil yang kedua terjadi *flypaper effect* di 10 Kabupaten di Sulawesi Tengah yang menyebabkan kenaikan belanja daerah pada tahun berjalan.

Dan pada tahun 2016 peneliti bernama Elce Yuliana simanungkalit melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh DAU dan PAD terhadap pertumbuhan

Belanja Daerah di Kota Bitung”. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Tabel 2.4 Lampiran Peneliti Terdahulu

Ferly Christian Kolinug (2015)	Analisis Pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja daerah Pemerintah Kota Manado.	Dependen : DAU dan PAD Independen : Belanja Daerah	PAD dan DAU secara serentak maupun terpisah berpengaruh positif terhadap belanja daerah dan pengaruh PAD dan BD dan memberikan bukti tentang tidak adanya keberadaan <i>flypaper effect</i> .
Juliana Florence Sorongan (2013)	Analisis hubungan DAU,PAD dan belanja daerah di Kabupaten di Minahasa Selatan	Dependen : DAU dan PAD Independen : Belanja Daerah	Hubungan PAD dan DAU terhadap belanja daerah rendah dan tidak berpengaruh.
Dyah Arsita Sari (2013)	Analisis Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Boyolali	Dependen : DAU dan PAD Independen : Belanja Daerah	1.DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja daerah di Kabupaten Boyolali. 2.PADberpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah di Kabupaten Boyolali.
Andri Devita (2014)	Pengaruh PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Dependen : PAD,DAU dan Jumlah Penduduk Independen : Belanja Daerah	PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja daerah.
Ahmad Syafrudin (2014)	Pengaruh PAD terhadap belanja daerahdi	Dependen : PAD Independen :	PAD yang sah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

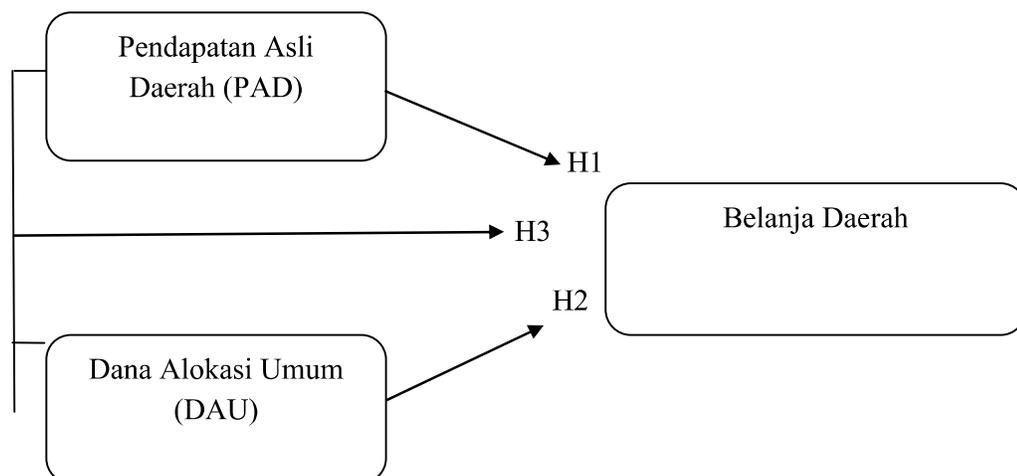
	Kabupaten Kudus Tahun 2004-2013	Belanja Daerah	di Kabupaten Kudus.
--	------------------------------------	----------------	---------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan

Anggaran Belanja Daerah di Kota Batam

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan

Anggaran Belanja Daerah di Kota Batam

H3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan Anggaran

Belanja Daerah di Kota Batam

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:3) mendefinisikan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Carailmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variable, yakni menganalisis adanya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Desain penelitian pada dasarnya menggambarkan adanya prosedur-prosedur yang mungkin dapat menguji hipotesis penelitian agar bisa mencapai kesimpulan mengenai hubungan dan pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini.

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan menggunakan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2. Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2012 : 38), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hak tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

3.2.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2012 : 39), Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering juga disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (X1)

Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah Pendapatan daerah yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.1.2 Dana Alokasi Umum (X2)

Dana Alokasi Umum (X2) Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3.2.2 Variabel dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2012 : 39), variabel dependen disebut variabel output, kriterian, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

3.2.2.1 Belanja Daerah (Y1)

Belanja Daerah (Y1) Belanja Daerah adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3.3. Populasi dan Sample

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2012 : 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/ subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu laporan pendapatan asli daerah diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. Dan juga dana alokasi umum dan belanja daerah pemerintah kota batam tahun 2010-2015 dari Bagian Keuangan Sekretariat Kota Batam.

3.3.2 Sampel

Sugiyono, (2012:91), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Jenuh. Sampling Jenuh (*Sampling Sensus*) adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah diterbitkan oleh tahun 2010-2015 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam. Juga dana alokasi umum dan belanja daerah pemerintah kota Batam tahun 2010-2015 dari Bagian Keuangan Sekretariat Kota Batam sebanyak 72 data.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono 2012 : 224). Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik sekunder yaitu mengumpulkan data-data diperoleh melalui pengumpulan data-data dari laporan perencanaan Pendapatan Asli Daerah yang dipublikasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Bagian Keuangan sekretariat Pemerintah Kota Batam. Dan juga dengan cara mengumpulkan data-data secara tidak langsung dari media perantara yaitu internet.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, (Sugiyono, 2012 : 147). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan bantuan program Software SPSS.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Sugiyono (2012 : 147), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan untuk umum atau generalisasi.

Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui table, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata standar deviasi dan perhitungan presentasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari gejala heteroskedastitas, gejala multikolinearitas dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yakni tidak terdapat heteroskedastitas, tidak terdapat multikolinearitas. Jika terdapat heteroskedastitas, maka varian tidak boleh konstan sehingga dapat menyebabkan besarnya *standart error*. Jika terdapat multikolinearitas, maka akan sulit untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari variabel, sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Oleh karena itu, uji asumsi klasik perlu dilakukan. Pengujian-pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Wibowo (2012: 61), adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji (t-tes misalnya) dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell-shaped curve*. Kedua sisi kurva melebar sampai tidak

terhingga. Suatu data dikatakan tidak normal jika memiliki nilai yang ekstrim atau biasanya jumlah data yang terlalu sedikit.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Histogram Regression Residual yang sudah distandarkan, analisis Chi Square dan juga menggunakan Nilai Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika: Nilai Kolmogorov – Smirnov $Z < Z$ table; atau menggunakan Nilai Probability Sig (tailed) $> \alpha$; sig $> 0,05$, (Wibowo, 2012: 62).

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Priyono, (2010 : 81) multikolinearitas adalah keadaan di mana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Didalam persamaan regresi tidak boleh ada korelasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Jika pada model persamaan tersebut terjadi gejala multikolinearitas itu berarti sesama variabel bebasnya terjadi korelasi. Gejala multikolinearitas dapat diketahui melalui suatu uji yang dapat mendeteksi dan menguji apakah persamaan yang dibentuk terjadi gejala multikolinearitas. Salah satu cara dari beberapa cara untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan menggunakan atau melihat *tool varian inflation factor* (VIF) (Wibowo, 2012: 87).

Caranya adalah dengan melihat nilai masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk melihat suatu variabel bebas memiliki korelasi dengan variabel bebas yang lain dapat dilihat dengan nilai VIF tersebut. Algifari (2000) dalam Wibowo (2012: 87) jika nilai VIF kurang dari 10, itu menunjukkan model tidak terdapat gejala multikolinearitas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel bebas.

Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan mengolerasikan antara variabel bebasnya, bila nilai koefisien korelasi antar variabel bebasnya tidak lebih besar dari 0,5 maka dapat ditarik kesimpulan model persamaan tersebut tidak mengandung multikolinearitas.

3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time series*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi.

Dalam penelitian ini akan digunakan uji autokorelasi dengan menggunakan metode Durbin –Watson.

Tabel 3.1 : Tabel Durbin-Watson

Durbin-Watson	Kesimpulan
< dl	Terdapat autokorelasi
dL sampai Du	Tanpa Kesimpulan
dU sampai dengan 4 – dU	Tidak terdapat autokorelasi
4 – dU sampai dengan 4 – dL	Tanpa Kesimpulan
4 – dL	Ada korelasi

Kesimpulan dapat dilakukan dengan asumsi dan bantuan dua buah nilai dari table Durbin – Watson diatas, yaitu nilai dL, dan nilai dU pada K (variabel bebas) tertentu. Kesimpulan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada jika nilai Durbin – Watson berada pada range nilai dU samapi 4-dU, maka ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Nilai kritis yang digunakan adalah default spss= 5%. Cara yang lain adalah dengan menilai tingkat propabilitas, jika > 0,05 berarti tidak terjadi korelasi dan sebaliknya (Wibowo, 2012: 101-106).

Rumus matematis untuk uji Durbin – Watson adalah sebagai berikut:

$$d = \frac{\sum(e_n + e_{n-1})}{\sum e^2 x}$$

Rumus 3.1 Durbin – Watson

Keterangan :

d = Durbin-watson

e = Residual

3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians atau residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Gleyser yang dapat diaplikasikan di SPSS, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel independen dalam model regresi. Jika hasil nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikan $>$ nilai alpha nya (0,05) maka model tidak mengalami heteroskedastisitas (Wibowo 2012: 93).

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai factor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2012: 250)

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya merupakan analisis yang memiliki pola teknis dan substansi yang hamir sama dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis ini memiliki perbedaan dalam jumlah hal variabel independen yang

merupakan variabel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah. Variabel penjelas yang lebih dari satu inilah yang kemudian akan dianalisis sebagai variabel-variabel yang memiliki hubungan-pengaruh, dengan, dan terhadap, variabel yang dijelaskan atau variabel dependen.

Model regresi linear berganda dengan sendirinya menyatakan suatu bentuk hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependennya. Didalam penggunaan analisis ini beberapa hal yang bisa dibuktikan adalah bentuk dan arah hubungan yang terjadi antara variabel independen dan dependen, serta dapat mengetahui nilai estimasi atau prediksi nilai dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya jika suatu kondisi terjadi. Kondisi tersebut adalah naik atau turunnya nilai masing-masing independen itu sendiri yang disajikan dalam model regresi.

Persamaan regresi berganda adalah:

$$Y' = a + bX_1 + bX_2 + \dots + bX_n \quad \text{Rumus 3.2 regresi linear berganda}$$

Keterangan:

Y' = Penyusunan Anggaran Belanja Daerah

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

- a = kontanta (nilai Y' bila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)
- b = koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Dalam pengujian hipotesis, keputusan yang diambil adalah ketidakpastian, artinya keputusan bisa benar dan salah sehingga menimbulkan resiko. Besar kecilnya resiko dinyatakan dalam probabilitas. Pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting dari statistik inferensial (statistic induktif) karena berdasarkan pengujian tersebut, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan sebagai dasar penelitian lebih lanjut dapat terselesaikan.

Metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah determinasi dan uji T

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi

Wibowo (2012 : 135) analisis determinasi digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau presentasi sumbangan pengaruh variabel bebas dalam metode regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas.

Rumus untuk menghitung determinasi adalah:

$$Kd = r^2 \times 100\% \quad \text{Rumus 3.3 Rumus Analisis Koefisien Determinasi}$$

Keterangan kd = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi

Dimana bilamana :

Kd = 0, berarti pengaruh x terhadap y, lemah

Kd = 1, berarti pengaruh variabel x terhadap y, kuat

3.5.4.2 Uji t (Parsial)

Menurut Priyatno (2011 : 52) uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut;

H_0 : variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

H_a : variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

Uji t dikenal dengan dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Rumus uji t sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n} - 2}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

Rumus 3.4 Rumus Uji t

t = distribut t

n = jumlah data

r = koefisien korelasi parsial

r^2 = koefisien determinasi

adapun kriteria dari pengujian hipotesis ini adalah :

1. Jika t hitung $>$ t tabel atau signifikan $<$ 0,005 maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika t hitung $<$ t tabel atau signifikan $>$ 0,005 maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3.5.4.3 Uji F (Simultan)

Menurut Priyatno, (2010: 67) uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Rumus mencari F hitung adalah sebagai berikut :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Rumus 3.5 Rumus Uji F

Dimana :

R = koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

n = jumlah data atau kasus

Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan (Uyanto, 2009: 191) adalah sebagai berikut:

- a. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa secara variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa secara variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Jika $P\text{-value} \geq \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.
- d. Jika $P\text{-value} < \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, adapun lokasi dan jadwal penelitian yang telah ditentukan, sebagai berikut:

3.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Batam dan Kantor Pemerintah Kota (PEMKO) Bagian Keuangan Kota Batam di Jalan Engku Putri No.1 Batam Center, Batam.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 5 (lima) bulan mulai bulan Sept sampai Jan. Untuk lebih jelasnya jadwal kegiatan ini dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Keterangan	Sep-16		Okt-16					Nov-16		Des-16			Jan-17	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Studi Kepustakaan	■													
Pengajuan Proposal (Bab I)			■											
Pengumpulan Data dan Penelitian Lapangan (Bab II)				■										
Pengolahan dan Analisis Data (Bab III & IV)							■							
Penulisan Laporan (Bab V)												■		